

ANALISIS SISTEM PENCATATAN LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR KECAMATAN ULUMORO'O KABUPATEN NIAS BARAT

Oleh:

Kurniawan S. Zai

Program Studi D3 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional

email: kurniawanzai64@gmail.com

ABSTRAK

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan *good governance*. Pertama, akuntabilitas karena dengan adanya standar, pengungkapan efektivitas dan efisiensi APBN/APBD menjadi bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi karena dengan adanya standar, BPK menjadi mudah menyingkap tempat-tempat yang memiliki celah untuk melakukan korupsi karena telah mempunyai basis yang baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit atas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sampel penelitian merupakan keseluruhan jumlah populasi karena keterbatasan jumlah responden yang diteliti. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Kantor Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan untuk akuntansi belanja dan akuntansi aset sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor S.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Kegiatan pencatatan tersebut meliputi jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian dan jurnal penutup. Kegiatan pencatatan tersebut dilakukan oleh Kantor Kecamatan Ulu Moro'o berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara pengeluaran.

Kata Kunci: Sistem Pencatatan, Laporan Keuangan

ABSTRACT

Preparation of financial reports based on government accounting standards can actually be used as a way to achieve good governance. First, accountability because with the existence of standards, the disclosure of the effectiveness and efficiency of the APBN / APBD is credible and accountable. Second, transparency because with the existence of standards, it is easy for BPK to expose places that have loopholes for corruption because they already have a standard, solid and comprehensive basis in the task of financial audits and audits of financial reports. This research uses qualitative research. The research sample is the entire population because of the limited number of respondents studied. From the results of the research, it was found that the Ulu Moro'o District Office of West Nias Regency had recorded financial accounting for expenditure accounting and asset accounting in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management, as well as the Circular of the Minister of Home Affairs Number S. 900/316 / BAKD concerning Guidelines for Administration and Accounting Systems and Procedures,

Reporting and Regional Financial Accountability. The recording activities include journals, ledgers, trial balances, adjusting entries, trial balance after adjustments and closing entries. This recording activity is carried out by the Ulu Moro'o District Office based on the source documents submitted by the expenditure treasurer.

Keywords: *Recording System, Financial Report*

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). World Bank dalam Mardiasmo (2004:18) mendefinisikan Good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi serta pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Dalam rangka mewujudkan good governance diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistik ke sistem baru yaitu otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada daerah dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Johanes (2015) Sebelum pembuatan sistem informasi akuntansi pengelolaan keuangan ini, terlebih dahulu telah dilakukan kegiatan analisis terhadap sistem lama yang sedang berjalan saat ini. Tujuan

dari fase analisis adalah memahami dengan sebenar-benarnya kebutuhan dari sistem baru dan membuat atau membuat sebuah sistem yang mewadahi kebutuhan tersebut, atau memutuskan bahwa sebenarnya pembuatan sistem baru dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Sistem informasi akuntansi pengelolaan keuangan ini menggunakan software teknologi komputer yang sedang mengalami perkembangan dan banyak digunakan, yaitu dengan memanfaatkan Microsoft Visual Basic 6.0., sebagai aplikasi bahasa pemrograman dan Microsoft SQL Server 2008 sebagai aplikasi membuat database. Dengan perancangan sistem yang terkomputerisasi diharapkan dapat membantu usaha warnet untuk menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan secara akurat dan tepat.

Kantor Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Kantor Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh karena itu, camat disebut juga Pengguna Anggaran (PA). Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), Kepala Daerah (Bupati) yang mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada camat, pada akhirnya akan meminta camat membuat

pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya.

Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (surat pertanggungjawaban), tetapi berupa laporan keuangan sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan anggaran yang digunakan, harus dicatat dalam sistem laporan keuangan yang benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatan keuangan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam melaksanakan sistem pencatatan akuntansi di Kantor Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat pada beberapa tahun yang lalu menggunakan sistem tata buku tunggal (single entry) dengan basis kas (cash basis) sehingga lebih tepat disebut pembukuan yang hanya bagian kecil dari akuntansi. Penggunaan metode pencatatan single entry akan menyulitkan untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi serta membuat laporan keuangan yang dihasilkan sulit diperiksa kebenarannya (tidak auditable). Dengan adanya Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah maka pencatatan laporan keuangan pada Kantor Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Hal ini memuat pedoman dalam penerapan Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). SKAD merupakan penyempurnaan dari sistem pengelolaan keuangan daerah sebelumnya, dimana SKAD sudah menggunakan metode pencatatan double entry dengan sistem akuntansi berbasis kas modifikasi yang mengarah kepada basis akrual (*accrual basis*). Dengan penerapan SKAD yang menggunakan sistem komputerisasi maka akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (entitas) pemerintah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi belanja, penerapan penerapan akuntansi asset, penerapan analisis pelaporan keuangan, dan solusi yang dilakukan pada kantor kecamatan Ulumoro'o Kabupaten Nias Barat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Laporan keuangan dapat dijadikan media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan, dimana laporan keuangan tersebut terdiri dari neraca, perhitungan rugi

laba, ikhtisar laba ditahan dan laporan posisi keuangan.

Berikut ini merupakan pengertian dan definisi laporan keuangan dari berbagai sumber:

1. Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK): Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya: sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009:31).
2. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi dan merupakan informasi histories. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut (M. Sadeli, 2002:2).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan mencerminkan semua transaksi usaha sepanjang waktu yang menghasilkan baik peningkatan maupun penurunan bersih nilai ekonomi bagi pemilik modal. Oleh karena itu laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan.

Tujuan Laporan Keuangan

1. Menyediakan informasi yang dapat diandalkan tentang kekayaan dan kewajiban.
2. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai tentang perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha.
3. menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih yang bukan berasal dari kegiatan usaha.
4. Menyajikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan perusahaan memperoleh laba.
5. Menyajikan informasi lain yang sesuai atau relevan dengan keperluan para pemiliknya.

Standar Akuntansi Keuangan menjelaskan bahwa tujuan laporan

keuangan antara lain:

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan disusun memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu.

Laporan keuangan yang menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggung jawaban manajemen atas, sumberdaya yang di percayakan kepadanya.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan ini memberikan kewenangan yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Tujuan utama dari kedua Undang-undang

tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola

sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;

- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Kantor Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat merupakan sebuah kecamatan yang baru dimekarkan dari kecamatan Mandrehe dan berdiri pada tanggal 10 Februari 2006, sejak pemekaran wilayah Kabupaten Nias Barat menjadi beberapa kecamatan. Setelah pemekaran, maka kantor Kantor Kecamatan Ulu Moro'o membangun dan mendirikan sebuah gedung yang dijadikan Kantor Kecamatan sebagai tempat untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan baik oleh Camat maupun oleh para pegawai yang di tempatkan pada kantor tersebut. Ditinjau dari karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini diklasifikasikan sebagai jenis penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai bendahara penerimaan dan pengeluaran di Kantor Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat yang berjumlah 15 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh yang mewakili seluruh populasi.

Dengan demikian maka sampel penelitian yang digunakan penulis adalah seluruh pegawai bendahara penerimaan dan pengeluaran di Kantor Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat yang berjumlah 15 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi dan wawancara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akuntansi Belanja

Pencatatan Belanja pada Kantor Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat sudah dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kantor Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat juga sudah menerapkan siklus akuntansi mulai dari pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal, posting ke buku besar masing-masing perkiraan, membuat Jurnal Penyesuaian, menyusun Neraca Saldo dan Neraca Saldo setelah penyesuaian, menyusun Laporan Keuangan serta membuat jurnal penutup.

Kantor Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat juga sudah menggunakan format pembukuan dan laporan keuangan sesuai dengan format yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penerapan Akuntansi Aset

Aset yang dimaksud adalah Aset Tetap, dan akuntansi aset merupakan lanjutan dari akuntansi belanja yang menghasilkan Aset Tetap. Akuntansi Aset pada Kantor Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi terhadap penambahan dan pengurangan nilai aset. Akuntansi Aset ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Analisis Laporan Keuangan

Dalam penyusunan Laporan Keuangan tahunan, Kantor Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat telah menyusun Laporan Keuangan Tahunannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan dan belanja yang dibandingkan dengan anggarannya selama satu tahun anggaran.
2. Neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal akhir tahun anggaran.

3. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: Informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target kinerja Kantor Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Kantor Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat. Kebijakan akuntansi pada Kantor Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat. Penjelasan pos-pos keuangan dan penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pencatatan Laporan Keuangan di Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat.

Dalam melakukan pencatatan Laporan Keuangan di Kantor Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat maka dapat diuraikan beberapa kendala yang dihadapi yaitu:

a. Tidak ada bendahara penerimaan yang ditugaskan pada Kantor Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat. Transaksi penerimaan kas hanya dilakukan oleh bendahara pengeluaran yaitu penerimaan kas atas dana yang akan digunakan untuk kegiatan Kantor Kecamatan Ulu Moro'o selama Tahun Anggaran bersangkutan. Hal ini mengakibatkan kesulitan bendahara dalam menguraikan pencatatan dalam laporan keuangan serta birokrasi kerja

yang terlalu lama.

b. Lambatnya penyampaian Laporan Keuangan Kantor Kecamatan untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan Keuangan ini disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan sebagai Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Kantor Kecamatan. Hal ini disebabkan banyak item yang dimuat dalam Laporan Keuangan yang disusun oleh Kantor Kecamatan Ulu Moro'o yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Solusi yang Dilakukan Kantor Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat

Berdasarkan kendala-kendala yang telah diuraikan diatas maka ada beberapa solusi yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat sebagai berikut:

1. Dengan tidak adanya bendahara penerimaan yang ditugaskan pada Kantor Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat maka tugas dan fungsi bendahara pengeluaran dimaksimalkan. Bendahara pengeluaran telah beberapa kali ditugaskan untuk ikut pelatihan dalam hal pencatatan penerimaan keuangan di Kantor Kecamatan Ulu Moro'o

Kabupaten Nias Barat sehingga masalah-masalah yang dihadapi dalam hal penerimaan keuangan dapat diatasi.

2. Dalam hal keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Kantor Kecamatan untuk tahun anggaran yang bersangkutan maka Ulu Moro'o melakukan pencatatan laporan keuangan secara berkala/bulanan sehingga memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan tahunan yang selanjutnya dijadikan sebagai Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kantor kecamatan untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Bagian Keuangan.

5. KESIMPULAN

Setelah melihat data-data laporan keuangan dan keterangan yang diperoleh pada Kantor Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat mengenai sistem pencatatan laporan keuangan pada Kantor Kecamatan Ulu Moro'o yang telah diuraikan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kantor Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan untuk akuntansi belanja dan akuntansi aset sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor S.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Kegiatan pencatatan tersebut meliputi jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian dan jurnal penutup. Kegiatan pencatatan tersebut dilakukan oleh Kantor Kecamatan Ulu Moro'o berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara pengeluaran.

2. Laporan Keuangan yang dihasilkan pada akhir tahun (khususnya tahun anggaran 2015) terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, serta Catatan atas Laporan Keuangan, dimana format dan uraian perkiraan telah diklasifikasikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2016 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Dalam penyusunan laporan keuangan, Kantor Kecamatan Ulu Moro'o menghadapi berbagai kendala antara lain tidak adanya bendahara penerimaan serta lambatnya penyampaian laporan keuangan tahunan. Hal ini dapat diatasi oleh Kantor Kecamatan Ulu Moro'o dengan memaksimalkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki serta dilakukannya pencatatan transaksi keuangan secara berkala sehingga memudahkan dalam pembuatan laporan tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2000, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi VI, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Dedi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati, 2007, *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta, Salemba Empat.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah, 2005, *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mardiasmo, 2004, *Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemeritah Daerah*, Yogyakarta, JAAI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 tahun 2008. *Pedoman Pelaksanaan Review Atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, *Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Soemarso S.R, 2002, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta, Salemba Empat.
- Suhanda, 2007, *Akuntansi Pemerintahan Daerah*, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi Revisi, Alfabeta, Bandung.
- Suliyanto, 2000, *Desain Proposal Penelitian*, Pyramid Publisher, Yogyakarta.
- Undang-undang No 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta.
- Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Jakarta